PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Reza Irdianto
NPP. 33.0409
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: rezairdianto82@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si.
Email: animartini@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the suboptimal implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD) in the formation of Regional Regulations (Perda) in Purwakarta Regency, which is indicated by the dominance of draft regional regulations proposed by the executive compared to DPRD initiatives. This condition reflects that the legislative role of DPRD in representing public aspirations and supporting the realization of good governance has not been fully optimized.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the DPRD's legislative function and to formulate strategies for improving the implementation of the legislative function in the formulation of Regional Regulations in Purwakarta Regency.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach with data collection techniques conducted through interviews and documentation involving DPRD members, the DPRD secretariat, and other related parties. Data analysis was carried out using the Data Analysis Procedure by Application (DAPA) assisted by NVivo 12 software and strengthened through SWOT analysis.* ***Result:*** *This study found that the implementation of the DPRD legislative function in Purwakarta Regency has not been optimal, as reflected in the low use of DPRD initiative rights, limited legal drafting capacity, and insufficient public participation. Supporting factors include technical guidance programs, regulatory support, and cooperation with the local government, while inhibiting factors include limited human resource capacity, low public understanding, limited resources and technology, budget constraints, and institutional coordination problems.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of the legislative function of the DPRD in the formulation of Regional Regulations to realize good governance in Purwakarta Regency has not been optimal. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing public participation, and optimizing the use of information technology are necessary to produce more aspirational and effective Regional Regulations.*

Keywords: *DPRD; Good Governance; Legislative Function; Regional Regulation; SWOT*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Purwakarta yang ditunjukkan oleh dominannya usulan Raperda dari pihak eksekutif dibandingkan inisiatif DPRD. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa peran legislasi DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya *good governance* belum berjalan secara maksimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD serta merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda di Kabupaten Purwakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan anggota DPRD, sekretariat DPRD, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 dan diperkuat melalui analisis SWOT. **Hasil/Temuan:**Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta belum optimal, yang ditandai dengan rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD, keterbatasan kemampuan legal drafting, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi adanya program bimbingan teknis, dukungan regulasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya dan teknologi, keterbatasan anggaran, serta kendala koordinasi kelembagaan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Perda guna mewujudkan *good governance* belum berjalan optimal sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi agar pembentukan Perda lebih aspiratif dan efektif.

Kata Kunci: DPRD; Fungsi Legislasi; *Good Governance*; Peraturan Daerah; *SWOT*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kedudukan strategis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berfungsi sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sarana dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga penetapan Perda. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi legislasi DPRD menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Good governance pada dasarnya menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah dan penguatan praktik demokrasi lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sangat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan (Bjørgen et al., 2021).

Pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas membutuhkan kapasitas kelembagaan yang baik, partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi yang memadai. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD masih belum optimal karena rendahnya pemanfaatan hak inisiatif legislatif serta dominannya usulan Raperda yang berasal dari pihak eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi legislasi secara mandiri dan aspiratif sebagai lembaga representasi masyarakat daerah (Martini et al., 2021).

Selain itu, kapasitas anggota legislatif dalam memahami substansi hukum dan teknik legal drafting juga menjadi faktor penting dalam pembentukan Perda. Hambatan administratif, politik, dan kelembagaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks fungsi legislasi, kapasitas sumber daya manusia DPRD menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rafique et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi daerah juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan *good governance*. Keterlibatan stakeholder dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif (Pitono & Kartiwi, 2021).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan e-governance dapat meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung penyebaran informasi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta meningkatkan keterbukaan proses pembentukan Perda sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan daerah (Kurniawan et al., n.d.).

Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi secara efektif guna menghasilkan Perda yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023–2025, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD masih menunjukkan belum optimalnya penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Raperda dibandingkan usulan dari pihak eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran DPRD dalam pembentukan Perda masih perlu ditingkatkan agar fungsi representasi masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Selain rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD, pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Purwakarta juga menghadapi berbagai kendala lain seperti keterbatasan kapasitas anggota DPRD, keterbatasan sumber daya dan teknologi, serta kendala koordinasi antar lembaga. Kapasitas kelembagaan dan efektivitas tata kelola pemerintahan sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah (Pitono et al., 2023).

Sementara itu, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu memperkuat kapasitas legislasi DPRD melalui peningkatan kompetensi anggota, optimalisasi partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi kelembagaan (Hasibuan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance*. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD serta merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi agar pembentukan Perda di Kabupaten Purwakarta menjadi lebih aspiratif, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi legislasi DPRD merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif daerah yang berperan penting dalam menghasilkan kebijakan daerah yang aspiratif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta masih menunjukkan berbagai kendala, terutama rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibandingkan dominasi usulan dari pihak eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi representasi DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pembentukan Perda belum berjalan secara optimal.

Permasalahan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD salah satunya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia anggota legislatif. Tidak seluruh anggota DPRD memiliki latar belakang atau kemampuan yang memadai dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Akibatnya, proses penyusunan Raperda masih sangat bergantung pada dukungan tenaga ahli maupun pihak eksekutif. Rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas anggota legislatif dalam memahami substansi hukum dan teknik pembentukan peraturan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan DPRD belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi legislasi secara mandiri dan optimal (Pitono et al., 2021).

Selain faktor kapasitas anggota DPRD, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda juga masih belum berjalan maksimal. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance*. Dalam praktiknya, masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap proses legislasi daerah serta minimnya akses informasi mengenai penyusunan Perda. Akibatnya, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan daerah. Rendahnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan dapat memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan serta mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan daerah (Beck & Stropoli, 2021).

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Di era digital saat ini, teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan memperluas akses partisipasi masyarakat terhadap proses kebijakan publik. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta masih belum optimal, baik dari sisi infrastruktur maupun kemampuan sumber daya manusia. Penerapan e-governance menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Vitálišová et al., 2021).

Selain itu, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD juga masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses pembentukan Perda membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar pembahasan kebijakan dapat berjalan

efektif dan tepat waktu. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan koordinasi yang menyebabkan proses legislasi berjalan kurang optimal. Efektivitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan serta kualitas koordinasi antarorganisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah (Kartiwi et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya pada umumnya membahas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dari aspek hukum, kelembagaan, maupun hubungan antara legislatif dan eksekutif. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dengan memadukan analisis kelembagaan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan strategi peningkatan fungsi legislasi dalam perspektif *good governance*. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak menggunakan pendekatan analisis berbasis Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 yang dipadukan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan fungsi legislasi DPRD secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah, sekaligus merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar perumusan strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih partisipatif, efektif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Penelitian ini menjadi penting karena pelaksanaan fungsi legislasi DPRD masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembentukan Perda. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan serta menghambat terwujudnya pemerintahan daerah yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain penting secara praktis, penelitian ini juga memiliki urgensi secara akademis karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD, tata kelola pemerintahan daerah, dan pembentukan kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi ilmiah mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dengan pendekatan analisis yang lebih komprehensif melalui penggunaan Data Analysis Procedure by Application (DAPA), bantuan perangkat lunak NVivo 12, serta analisis SWOT dalam merumuskan strategi peningkatan fungsi legislasi.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Purwakarta akan mengalami keterbatasan data dan informasi empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Akibatnya, perumusan strategi peningkatan fungsi legislasi berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, tanpa adanya evaluasi dan kajian yang mendalam, proses pembentukan Peraturan Daerah dapat terus didominasi oleh pihak eksekutif, partisipasi masyarakat tetap rendah, serta kualitas Perda yang dihasilkan berpotensi kurang aspiratif sehingga dapat menghambat terwujudnya *good governance* di Kabupaten Purwakarta.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah serta upaya mewujudkan *good governance* di daerah. Penelitian Handoyo mengenai *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRK dalam Pembentukan Qanun di Kabupaten Aceh Barat* menemukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRK Aceh Barat belum berjalan optimal karena masih dominannya usulan regulasi dari pihak eksekutif dibandingkan hak inisiatif legislatif. Selain itu, keterbatasan kapasitas anggota legislatif dan lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat dalam proses pembentukan regulasi daerah (Handoyo, 2021).

Penelitian Laute mengenai *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Kotamobagu* menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum efektif karena rendahnya disiplin kerja anggota DPRD, kurang optimalnya pemanfaatan hak inisiatif, serta masih kuatnya dominasi pihak eksekutif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam mendukung kualitas legislasi daerah (Laute, 2021).

Penelitian Aermadepa dan Sepreni membahas rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produk legislasi daerah masih berasal dari usulan pemerintah daerah, sedangkan DPRD belum mampu menjalankan fungsi legislasi secara maksimal sebagai representasi aspirasi masyarakat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan legal drafting menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya inisiatif DPRD (Aermadepa & Sepreni, 2022).

Penelitian Yasser dan rekan-rekannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pembentukan Peraturan Daerah menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas produk hukum daerah. Semakin baik kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat, maka kualitas Perda yang dihasilkan juga semakin baik dan implementatif (Yasser et al., 2024).

Penelitian Samderubun et al. mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi legislasi sesuai ketentuan hukum dalam mendukung pembentukan Peraturan Daerah, khususnya pada sektor pertanian berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses pembentukan kebijakan daerah (Samderubun et al., 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance* masih belum banyak ditemukan. Selain itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan analisis Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 serta diperkuat melalui analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD secara lebih komprehensif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan, yakni pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance*. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses pembentukan Perda, tetapi juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD seperti kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi kelembagaan dalam proses legislasi daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Handoyo, Laute, maupun Aermadepa dan Sepreni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis Data Analysis Procedure by Application (DAPA) yang dibantu perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema-tema utama secara lebih sistematis dan terstruktur, serta diperkuat dengan analisis SWOT guna merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD secara lebih komprehensif.

Selain itu, pengukuran, indikator, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni menggunakan konsep *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Daerah yang lebih aspiratif dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance* di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dan merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD serta merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Perda di Kabupaten Purwakarta.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance*. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu menggambarkan fenomena, dinamika, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Selain itu, metode deskriptif digunakan agar peneliti dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda di Kabupaten Purwakarta.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive kepada informan yang dianggap memahami secara langsung proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Informan penelitian terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purwakarta, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta, dan masyarakat. tenaga ahli atau staf pendukung, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anggota DPRD, Sekretariat DPRD, dan pihak terkait lainnya, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check kepada beberapa informan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Uji dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis sehingga seluruh proses pengumpulan dan analisis data dapat ditelusuri kembali.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Penggunaan NVivo 12 bertujuan untuk mempermudah proses pengelompokan data, identifikasi tema-tema utama, serta visualisasi hasil analisis berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian. Tahapan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya, hasil analisis diperkuat menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance.*

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih karena DPRD Kabupaten Purwakarta merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah serta menjadi fokus utama penelitian terkait pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian dilaksanakan mulai dari 5- 24 Januari, yang meliputi pengumpulan data wawancara, dokumentasi, pengolahan data menggunakan NVivo 12, hingga analisis SWOT. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta secara aktual dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance* di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan fokus analisis terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD serta strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pendekatan Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 dan diperkuat melalui analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD secara lebih komprehensif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pembentukan Peraturan Daerah Guna Mewujudkan *Good Governance*

Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi legislasi memiliki peran strategis dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai kepentingan daerah dan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai representasi masyarakat yang bertugas menyalurkan aspirasi publik ke dalam kebijakan daerah yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi legislasi DPRD menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pembahasan bersama pemerintah daerah, hingga penetapan Perda. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan fungsi legislasi belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purwakarta, diketahui bahwa sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas masih berasal dari usulan pihak eksekutif dibandingkan hak inisiatif DPRD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda masih relatif rendah. Informan menjelaskan bahwa pihak eksekutif cenderung lebih siap dalam penyusunan naskah akademik, data pendukung, dan substansi regulasi sehingga usulan Raperda dari pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan inisiatif legislatif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Handoyo, 2021), (Laute, 2021), dan (Aermadepa & Sepreni, 2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan dominasi eksekutif dalam pembentukan regulasi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Selain rendahnya penggunaan hak inisiatif, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat anggota DPRD yang belum sepenuhnya memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan legal drafting secara komprehensif. Hal tersebut menyebabkan proses penyusunan Raperda sering kali bergantung pada tenaga ahli maupun pihak eksekutif dalam penyusunan substansi regulasi.

Keterbatasan kemampuan legal drafting tersebut berdampak pada kurang optimalnya kualitas inisiatif DPRD dalam mengusulkan Peraturan Daerah. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya pendukung juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembentukan Perda di DPRD Kabupaten Purwakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yasser et al., 2024) dam (Rahmat et al., 2024) yang menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi anggota DPRD, minimnya tenaga ahli, serta keterbatasan dukungan teknis menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi di daerah.

Sebelum penyusunan strategi peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta, penulis terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) guna mengidentifikasi kekuatan,

kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah. Melalui analisis SWOT, penulis dapat merumuskan strategi yang lebih terarah dan realistis dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD agar mampu mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* secara optimal.

Hasil analisis SWOT ini disusun berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta hasil analisis menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 12 terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan kondisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, serta perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi efektivitas pembentukan Peraturan Daerah. Berikut Adalah hasil pemetaan Matriks SWOT:

Tabel 1
Hasil Pemetaan Matriks SWOT

Faktor Internal **Faktor Eksternal**	***Strengths (S)***	***Weaknesses (W)***
	1.Adanya program Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD. 2.Sistem pembagian kerja berbasis komisi yang mendukung efektivitas pembahasan Raperda. 3.Keterlibatan masyarakat melalui forum formal dan kegiatan reses. 4.Ketersediaan naskah akademik sebagai landasan penyusunan Raperda. 5.Terjalinnya koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah.	1.Perbedaan kapasitas dan pemahaman antar anggota DPRD. 2.Partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai. 3.Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi yang belum optimal. 4.Koordinasi yang belum sepenuhnya efektif dalam kondisi tertentu. 5.Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan legislasi.
Opportunities (o)	***SO*** ***(Strengths-Opportunities)***	***WO*** ***(Weakness-Opportunities)***
1.Adanya regulasi yang mendorong transparansi dan partisipasi publik. 2.Perkembangan teknologi informasi yang mendukung digitalisasi legislasi. 3.Dukungan tenaga ahli, akademisi, dan stakeholder dalam penyusunan kebijakan. 4.Program peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat dan lembaga terkait. 5.Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang lebih akuntabel dan berkualitas.	1.Mengoptimalkan program Bimtek dengan dukungan peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat. 2.Memperkuat sistem kerja komisi dengan dukungan tenaga ahli dan akademisi. 3.Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan regulasi yang mendukung keterbukaan. 4.Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi.	1.Meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui program pelatihan dan Bimtek. 2.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi. 3.Memanfaatkan dukungan akademisi untuk memperkuat kualitas substansi Perda. 4.Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi kebijakan.
Threats (T)	***ST***	***WT***

	(Strengths-Threats)	*(Weakness-Threats)*
1. Kompleksitas dan dinamika regulasi yang terus berkembang. 2.Perbedaan kepentingan politik dalam proses legislasi. 3.Potensi disharmonisasi antara kebijakan daerah dan peraturan yang lebih tinggi. 4.Keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi. 5.Tingginya ekspektasi masyarakat yang tidak selalu diimbangi dengan kondisi riil.	1.Memanfaatkan koordinasi yang baik untuk meminimalisir konflik kepentingan politik. 2.Menggunakan naskah akademik sebagai dasar untuk menghindari disharmonisasi regulasi. 3.Mengoptimalkan peran komisi dalam menghadapi kompleksitas peraturan. 4.Meningkatkan kualitas pembahasan Raperda agar tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan.	1.Mengelola anggaran secara efisien untuk menghadapi keterbatasan fiskal daerah. 2.Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap dinamika regulasi. 3.Memperkuat koordinasi internal guna meminimalisir hambatan politik. 4.Mengantisipasi risiko disharmonisasi kebijakan melalui penguatan evaluasi regulasi.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, diperoleh beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Strategi tersebut antara lain peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan legal drafting dan pendidikan legislasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi, penguatan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dan keterbukaan informasi legislasi.

Selain itu, DPRD Kabupaten Purwakarta juga perlu meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi agar proses pembentukan Peraturan Daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akses masyarakat terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah secara lebih terbuka dan partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance* belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dukungan sumber daya dan teknologi. Namun demikian, adanya dukungan regulasi, kerja sama kelembagaan, serta program peningkatan kapasitas menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di masa mendatang.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan bahwa peran DPRD sebagai lembaga legislasi daerah belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, masih dominannya usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari pihak eksekutif dibandingkan hak inisiatif DPRD menjadi indikator bahwa fungsi legislasi belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam legal drafting, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi turut memengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi legislasi dalam mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Purwakarta.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Handoyo, 2021), penelitian ini menemukan bahwa

dominasi usulan regulasi dari pihak eksekutif masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Handoyo menjelaskan bahwa rendahnya penggunaan hak inisiatif legislatif menyebabkan DPRD belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi representasi aspirasi masyarakat dalam pembentukan regulasi daerah. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di DPRD Kabupaten Purwakarta, dimana sebagian besar Perda yang dihasilkan masih berasal dari pemerintah daerah dibandingkan inisiatif DPRD sendiri.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Laute, 2021) yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum efektif karena rendahnya disiplin dan keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam menyusun regulasi daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih terdapat anggota DPRD yang belum memiliki kemampuan legal drafting secara optimal sehingga proses penyusunan Raperda sering kali bergantung pada tenaga ahli maupun pihak eksekutif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi legislasi.

Selanjutnya, penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Aermadepa & Sepreni, 2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis dan kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap proses pembentukan regulasi. Temuan penelitian di Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya pelatihan legal drafting, serta belum optimalnya dukungan teknis menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas legislasi DPRD.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek kelembagaan semata, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proses pembentukan Perda menyebabkan aspirasi publik belum tersalurkan secara maksimal. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yasser et al., 2024) yang menyatakan bahwa kualitas produk hukum daerah dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta dukungan sumber daya dalam proses legislasi.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dukungan regulasi, kerja sama dengan pemerintah daerah, dan pelaksanaan bimbingan teknis menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Samderubun et al., 2025) yang menjelaskan bahwa optimalisasi fungsi DPRD dan penguatan kapasitas kelembagaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembentukan kebijakan publik. Dengan kata lain, semakin baik pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses legislasi masih belum optimal. Padahal, digitalisasi legislasi dapat meningkatkan transparansi, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pembentukan Perda, serta memperluas ruang partisipasi publik. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang belum secara spesifik membahas pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan temuan tambahan bahwa transformasi digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah di era pemerintahan modern.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kemampuan legal

drafting, dan koordinasi kelembagaan, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan regulasi, partisipasi masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi partisipasi publik, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi agar mendukung terwujudnya *good governance.* Berikut adalah beberapa temuan utama penelitian terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Perda guna mewujudkan *good governance*, antara lain:

a. Rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda masih menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan fungsi legislasi;
b. Keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam legal drafting memengaruhi kualitas penyusunan Raperda;
c. Dukungan regulasi, bimbingan teknis, dan kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung pelaksanaan fungsi legislasi;
d. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda masih belum optimal sehingga aspirasi publik belum sepenuhnya terakomodasi;
e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses legislasi daerah masih terbatas;
f. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, dan digitalisasi legislasi menjadi strategi penting dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta masih memerlukan berbagai perbaikan baik dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi informasi agar pembentukan Perda dapat berjalan lebih efektif, aspiratif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance.*

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12, ditemukan beberapa tema dominan yang berkaitan dengan faktor penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, serta kendala koordinasi kelembagaan antara DPRD dan pemerintah daerah. Tema-tema tersebut divisualisasikan melalui word cloud berikut.

Gambar 1
Word Cloud Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta



Sumber : Nvivo 12, Diolah Oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan visualisasi word cloud hasil analisis NVivo 12, terlihat bahwa kata-kata seperti keterbatasan, anggaran, pemahaman, kapasitas, persepsi, dan regulasi muncul sebagai kata dominan. Dominasi kata keterbatasan menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi merupakan akumulasi dari berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya, kapasitas kelembagaan, maupun dukungan teknis. Kemunculan kata anggaran dan kapasitas mengindikasikan adanya kendala struktural, sementara kata pemahaman dan persepsi mencerminkan hambatan kognitif dan sosial yang mempengaruhi kualitas komunikasi dan penyusunan kebijakan.

Selain faktor internal kelembagaan, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah masih belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi daerah. Meskipun DPRD telah melaksanakan rapat dengar pendapat, konsultasi publik, dan kegiatan sosialisasi, partisipasi masyarakat dinilai masih bersifat formalitas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut menyebabkan aspirasi publik belum sepenuhnya terserap secara optimal dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang harus diwujudkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bunga (2019) yang menyatakan bahwa pembentukan Perda yang ideal harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya program bimbingan teknis dan pelatihan legislasi bagi anggota DPRD, dukungan regulasi yang jelas terkait pembentukan Perda, kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah, serta keberadaan tenaga ahli dan staf pendukung dalam proses pembahasan Raperda.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan bimbingan teknis dinilai cukup membantu anggota DPRD dalam memahami proses legislasi dan teknik penyusunan Peraturan Daerah. Selain itu, koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses legislasi daerah.

Hasil analisis NVivo 12 juga terlihat bahwa beberapa kata kunci muncul dengan frekuensi yang lebih dominan dibandingkan kata lainnya, seperti keterlibatan, BIMTEK, komisi, naskah akademik, serta masyarakat. Ukuran kata yang lebih besar dalam visualisasi tersebut menunjukkan tingkat kemunculan yang lebih tinggi dalam data hasil wawancara, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta.. Visualisasi hasil analisis tersebut dapat dilihat pada word cloud berikut.

Gambar 2

Word Cloud Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta



Sumber : Nvivo 12, Diolah Oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan visualisasi *word cloud* tersebut, terlihat bahwa faktor kerja sama antar lembaga, dukungan regulasi, serta peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis menjadi aspek yang cukup dominan dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi legislasi tidak hanya bergantung pada peran DPRD semata, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya sinergi antar lembaga, landasan regulasi yang memadai, serta peningkatan kompetensi anggota DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penguatan ketiga aspek tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah guna mewujudkan *good governance* belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh masih rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam legal drafting, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Adapun faktor pendukung pelaksanaan fungsi legislasi meliputi adanya dukungan regulasi, kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaksanaan bimbingan teknis, dan keberadaan tenaga ahli, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas anggota DPRD, keterbatasan anggaran dan teknologi informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, optimalisasi partisipasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar pembentukan Peraturan Daerah menjadi lebih aspiratif, efektif, dan mendukung terwujudnya *good governance*.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian dan keterbatasan dalam memperoleh data yang lebih luas terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada DPRD Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh DPRD di daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD di daerah lain dengan pendekatan dan metode yang lebih beragam agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam mengenai optimalisasi fungsi legislasi DPRD dalam mewujudkan *good governance*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta, para informan penelitian, dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aermadepa, A., & Sepreni, R. (2022). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 5*(1), 1–9. https://www.researchgate.net/publication/365075873_Pelaksanaan_Fungsi_Legislasi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kota_Solok_Menurut_Undang-Undang_Nomor_12_Tahun_2011_Tentang_Pembentukan_Peraturan_Perundang-Undangan

Beck, D., & Storopoli, J. E. (2021). Cities through the lens of stakeholder theory: A literature review. *Cities, 118*, 103377. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103377

Bjørgen, A., Fossheim, K., & Macharis, C. (2021). How to build stakeholder participation in collaborative urban freight planning. *Cities, 112*, 103149. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103149

Handoyo, B. (2021). Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat dalam perspektif siyasah syar'iyyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 4*(2), 94–110. https://doi.org/10.47647/jsh.v4i2.458

Hasibuan, S. I. (2022). Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Paluta dalam penetapan Perda APBD Kabupaten Paluta. *Jurnal Smart Hukum (JSH), 1*(1), 181–190. https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/148

Kartiwi, K., Pitono, A., Arwanto, A., & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi dan pembangunan desa di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas kesejahteraan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 7*(1), 59–81. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2219

Kurniawan, N. I., Lujala, P., Rye, S. A., & Vela-Almeida, D. (2022). The role of local participation in the governance of natural resource extraction. *The Extractive Industries and Society, 9*, 101029. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101029

Laute, F. G. (2021). Pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Kotamobagu. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/37736

Martini, A., Wutoy, M., & Wardhani, P. D. (2021). Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2024. *Jurnal Academia Praja, 4*(1), 14–22. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1712

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal institutions, government regulatory functions, and development of governance studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 16(2). https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746*

Pitono, A., & Kartiwi, K. (2021). Dampak dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 6(1), 33–56. https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1534*

Pitono, A., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2021). Internalisasi agile organizations dalam penyederhanaan eselonisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 14(1). https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1508*

Rafique, Z., Habib, S., & Rosilawati, Y. (2023). Legal, political and administrative barriers to citizen participation in local governance: An inquiry of local government institutions. *International Journal of Public Administration, 46*(4), 256–268. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1993908

Rahmat, A., Roza, D., & Benni, B. (2024). Implementasi kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif. *Ekasakti Legal Science Journal, 1*(3), 251–264. https://doi.org/10.60034/v2m0th18

Samderubun, F., Waas, R., & Kalalo, J. (2025). Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Governance, 5*(10), 29–44. https://doi.org/10.65675/alj.v2i1.128

Vitálišová, K., Svidroňová, M. M., & Muthová, N. J. (2021). Stakeholder participation in local governance as a key to local strategic development. *Cities, 118*, 103363. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103363

Yasser, M., & Nasution, M. (2024). *Pelaksanaan fungsi dan proses pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. *Journal of Science and Social Research, 7*(3), 1279–1285. https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/download/2120/1306